

ISSN : 2302-8777

J A H I

VOL. 3 NO. 1  
TAHUN 2014



---

*Jurnal Analisis  
Hubungan Internasional*

---

## Table of Contents

No.	Title	Page
1	Dampak Krisis Finansial 2008 Terhadap Angka Pengangguran di Jerman	1 - 16
2	Faktor-Faktor di Balik Perubahan Moda Masuk Billabong Internasional Ltd. dalam Ekspansinya ke Indonesia	17 - 30
3	Perubahan Strategi Revolutionary United Front (RUF) terhadap Intervensi UNAMSIL dalam Perang Sipil Sierra Leone 1999-2000	31 - 52
4	Peranan Ethiopia dalam Konflik di Somalia Kurun Waktu 2006 â€“ 2009	53 - 65
5	<b>Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013)</b>	67 - 83
6	Hubungan Indonesia-China pasca Normalisasi tahun 1990	85 - 104
7	Postur Kebijakan Perbatasan Indonesia â€“ Papua New Guinea	105 - 118
8	Pengaruh Krisis Ekonomi Global terhadap Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia di Pasar Internasional	119 - 140
9	Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012	141 - 155
10	Analisis Penghentian Proyek Bendungan Myitsone oleh Myanmar terhadap Cina Tahun 2009-2012	157 - 175
11	Disfungsi Peran UNFPA atas Kebijakan Kependudukan di Cina pada Tahun 1979 â€“ 1994	177 - 200
12	Prestise Kebangkitan Olahraga sebagai Sarana Kebangkitan Damai China	201 - 219
13	Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer Melaksanakan Misi Non-Tempur di Iraq Tahun 2004-2008	221 - 233
14	Terorisme sebagai Tantangan Kelompok Etnis terhadap Negara: Studi Kasus Gerakan Transnasional Boko Haram Di Nigeria	679 - 705
15	Strategi Advokasi OWC, ORIP, dan OPDP dalam Upaya Penyelesaian Konflik Penggusuran Masyarakat Ogiek di Hutan Mau 1990-2013	235 - 255
16	Pemberian Bantuan Amerika Serikat kepada Somalia sebagai Bentuk Pembendungan Kekuatan Cina di Afrika	257 - 276
17	Strategi Diplomasi Organisasi Non-Pemerintah dalam Resolusi Perang Sipil: MARWOPNET di Liberia 2000-2003	277 - 294
18	Pengaruh Ideologi Kiri Baru terhadap Perubahan Kebijakan Negara di Sektor Energi: Studi Kasus Venezuela	295 - 345
19	Pengaruh EU-China Information Society Project dalam Perkembangan E-Government China	347 - 361
20	Strategi Lobbying dan Rebranding Blackwater untuk Merespon Citra Negatif pasca Insiden di Irak Tahun 2004 â€“ 2012	363 - 396
21	Strategi Brasil Menghadapi TRIPS dan Tuntutan Amerika Serikat dalam Menangani Kasus HIVAIDS	397 - 409
22	Banana Wars: Menginterpretasi Limit Rezim Perdagangan Bebas Multilateral dalam World Trade Organization (WTO)	411 - 433

Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013)

Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013)

**Author :**

Anugerah Hendri Rahmanto |  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Abstract**

This research try to explain why Senkaku islands dispute haven't resolved even between 1998-2013 there is an effort to resolve dispute. To explain that, the writer use theoretical framework such as conflict dynamics, state level of analysis, dispute resolution through negotiation and power influence to interest and behavior. The writer hypothesis is Senkaku Islands dispute between China dan Japan resolution haven't succeed because the change of interest and behavior of China that influenced by their increasing power. That made China to stand stronger in their position which implies stronger polarization between China and Japan. The Writer found that the increasing power of China made him to stand alone and more aggressive. Because China stand strong for their position, the negotiation between China and Japan have been disturbed.

Keyword : Dispute, Senkaku, Islands, Negotiation, ZEE, Delimitation, Joint, Development, ,

**Daftar Pustaka :**

1. **Drifte, Reinhard, (2008)**. Japanese-Chinese Territorial Disputes in the East China Sea " Between Military Confrontation and Economic Cooperation. London : The London School of Economics and Political Science
2. **International Crisis Group, (2013)**. Dangerous Waters: China-Japan Relations on the Rocks. Brussels : International Crisis Group
3. **Su, Steven Wei, (2005)**. The Territorial Dispute over Tiaoyu/ Senkaku Islands: An Update. Beijing : Taylor and Francis Group
4. **Taylor, Claire and Youngs, Kim, (2008)**. House of Commons : China's Military Posture. London : House of common library
5. **Wallace, Rebecca M, (1986)**. Hukum Internasional. London : Sweet & Maxwell

# Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013)

Anugerah Hendri Rahmanto – 070912087

*Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*

## ABSTRACT

*This research try to explain why Senkaku islands dispute haven't resolved even between 1998-2013 there is an effort to resolve dispute. To explain that, the writer use theoretical framework such as conflict dynamics, state level of analysis, dispute resolution through negotiation and power influence to interest and behavior. The writer hypothesis is Senkaku Islands dispute between China dan Japan resolution haven't succed because the change of interest and behavior of China that influenced by their increasing power. That made China to stand stronger in their position which implies stronger polarization between China and Japan. The Writer found that the increasing power of China made him to stand alone and more agressive. Because China stand strong for their position, the negotiation between China and Japan have been disturbed.*

**Keywords:** *Dispute, Senkaku Islands, Negotiation, ZEE Delimitation, Joint Development, Cina Increasing Power*

*Penulis meneliti mengapa sengketa Kepulauan Senkaku belum menemukan penyelesaian sekalipun sepanjang tahun 1998-2013 telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa. Untuk menjawabnya penulis menggunakan kerangka pemikiran dinamika konflik, peringkat analisis negara, penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan pengaruh power terhadap perubahan sikap dan kepentingan. Hipotesis penulis adalah upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang belum menemui penyelesaian dikarenakan adanya perubahan kepentingan dan sikap dari Cina yang dipengaruhi oleh peningkatan kekuatannya. Hal tersebut membuatnya semakin bersikeras pada posisinya sehingga memicu semakin kuatnya polarisasi antara Cina dan Jepang. Penulis menemukan bahwa adanya peningkatan kekuatan Cina justru membuatnya menjadi lebih mandiri dan agresif. Dengan adanya hal tersebut Cina menjadi semakin bersikeras pada posisinya sehingga negosiasi antara Cina dan Jepang tidak bisa berjalan lancar.*

**Kata-Kata Kunci:** *Sengketa, Kepulauan Senkaku, Negosiasi, Delimitasi ZEE, Joint Development, Peningkatan Kekuatan Cina*

## Pendahuluan

Dewasa ini di kawasan Asia Timur terdapat permasalahan yang melibatkan hubungan antara negara dengan negara tetangganya. Salah satunya adalah sengketa atas kepemilikan Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang.<sup>1</sup> Jika sengketa Kepulauan Senkaku ini terus berlanjut dan tidak segera ditemukan penyelesaiannya maka hal ini juga dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa kepulauan lainnya yang juga sedang dialami oleh Cina dan Jepang seperti : Kepulauan Spratly, Kuril, Dokdo dan lain sebagainya.

Sengketa Kepulauan Senkaku ini sesungguhnya sudah terjadi sejak lama khususnya pada tahun 1969 setelah *Economic Commission for Asia and Far East (ECAFE)*<sup>2</sup> melakukan survei dan menemukan potensi cadangan minyak dan gas yang cukup besar di sekitar perairan Kepulauan Senkaku.<sup>3</sup> Penemuan ini membuat Cina dan Jepang sebagai negara yang berada sangat dekat dengan kawasan tersebut menjadi saling berebut atas kepemilikannya. Masing-masing terus berupaya untuk menunjukkan kedaulatannya hingga akhirnya pada tahun 1978 kedua negara sepakat untuk menandatangani *Japan-China Peace and Friendship Treaty*, yang menyatakan bahwa sengketa Kepulauan Senkaku ini akan dikesampingkan dan akan diselesaikan oleh generasi selanjutnya.<sup>4</sup>

Pada tahun 1996 merupakan saat ketika ketegangan hubungan kedua negara kembali meningkat.<sup>5</sup> Hal ini dimulai pada bulan Juni ketika Jepang mulai melakukan delimitasi<sup>6</sup> atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Senkaku. Selanjutnya pada bulan Juli, Jepang membangun sebuah mercusuar pada Pulau Kitakojima yang merupakan salah satu pulau dari Kepulauan Senkaku. Hal tersebut telah memicu kemarahan besar bagi Cina. Dengan mempertimbangkan pentingnya hubungan bilateral antara kedua negara, masing-masing memutuskan untuk berupaya menyelesaikan sengketa.

---

<sup>1</sup> Senkaku merupakan nama yang diberikan Jepang atas Kepulauan yang disengketakan. Sedangkan Cina memberikannya nama Diaoyu. Dalam hal ini penulis tidak bermaksud untuk memihak salah satu negara, tetapi selanjutnya penulis akan menggunakan nama Senkaku untuk Kepulauan tersebut

<sup>2</sup> ECAFE merupakan komisi ekonomi Asia yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada tahun 1974 berganti nama menjadi *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)*

<sup>3</sup> Global Security, *Senkaku Diaoyutai Islands*, dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm>, diakses 17 Juli 2013

<sup>4</sup> Cheng, *Diaoyu Islands Dispute*, dalam <http://www1.american.edu/TED/ice/DIAOYU.HTM>, diakses 8 April 2013

<sup>5</sup> Zhonqi Pan, *Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands: The Pending Controversy from the Chinese Perspective* (Journal of Chinese Political Science, vol. 12, no. 1, 2007), hlm. 75

<sup>6</sup> Delimitasi merupakan penetapan batas-batas antar negara yang wilayahnya saling tumpang tindih

## *Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013)*

Cina dan Jepang berupaya menyelesaikan sengketa Kepulauan Senkaku melalui negosiasi yang dimulai sejak tahun 1998. Dalam pertemuan tersebut kedua negara berupaya menyelesaikan sengketa melalui delimitasi ZEE. Namun negosiasi yang dilakukan ternyata belum membuahkan hasil. Karena keduanya masih bersikeras pada posisinya masing-masing. Oleh karena itu keduanya memutuskan untuk kembali bertemu pada tahun 2004. Pertemuan yang berlangsung hingga tahun 2008 tersebut pada akhirnya disepakati oleh kedua negara dengan kesepakatan akan dilakukannya *joint development*<sup>7</sup> di Laut Cina Timur.<sup>8</sup> *Joint development* ini akan dilakukan dengan prioritas delimitasi ZEE yang dilakukan secara bertahap pada masa transisi tanpa memandang posisi legal masing-masing negara.<sup>9</sup> Akan tetapi tidak lama setelah pernyataan masing-masing negara dengan akan dilaksanakannya *joint development*, dari pihak Cina terlihat cenderung pasif meski Jepang telah berulang kali memberikan dorongan sehingga *joint development* ini pada akhirnya terbengkalai hingga tahun 2010.<sup>10</sup>

Pada tahun 2010 terjadi peristiwa yang membuat hubungan kedua negara kembali memanas yaitu kapal nelayan Cina yang menabrakkan kapalnya dengan kapal penjaga pantai Jepang di sekitar perairan Kepulauan Senkaku.<sup>11</sup> Ketegangan ini kembali meningkat ketika tahun 2012 Jepang membeli tiga dari delapan pulau Kepulauan Senkaku yang terdiri dari Pulau Uotsurijima, Kitakojima, dan Minamikojima.<sup>12</sup> Hingga akhirnya pada tanggal 26 April 2013, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Cina dalam konferensi pers mengeluarkan pernyataan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan salah satu *core interest*<sup>13</sup> dari Cina.<sup>14</sup> Artinya negosiasi yang digunakan sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa akan semakin sulit tercapai.

---

<sup>7</sup> *Joint development* adalah kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk ataupun jasa. Dalam kasus ini *joint development* digunakan untuk bekerjasama dalam pengeboran minyak dan gas di sekitar perairan Kepulauan Senkaku.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Japan Policy Forum, *Japan-China Discord and Cooperation over East China Sea*, dalam <http://www.japanpolicyforum.jp/en/archive/no12/000370.html#kiji>, diakses 17 september 2013

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sourabh Gupta, *China-Japan trawler incident: Reviewing the dispute over Senkaku/Daioyu waters* (Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific, 2010), hlm. 1

<sup>12</sup> Japan Times, *China enraged, send ships 2 billion yen deal nationalizes the Senkakus*, dalam <http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120912a1.html>, diakses 13 November 2012

<sup>13</sup> *Core interest* adalah kepentingan yang diutamakan oleh suatu negara sehingga kepentingan tersebut tidak bisa diinterfensi oleh pihak-pihak lainnya dan akan tetap diperjuangkan meski harus berkorban sekalipun

<sup>14</sup> Chinese Embassy, *Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on April 26, 2013*, dalam <http://ag.chineseembassy.org/eng/fyrth/t1035948.htm>, diakses 11 Desember 2013

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk menjelaskan penyebab belum tercapainya penyelesaian sekalipun sepanjang tahun 1998-2013 telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa. Penulis menjelaskannya dengan menggunakan kerangka pemikiran dinamika konflik, peringkat analisis negara, penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan pengaruh power terhadap perubahan sikap dan kepentingan. Penulis dalam hal ini mencoba untuk melihat dari sisi Cina karena kontrol efektif Kepulauan Senkaku sebelumnya berada di tangan Jepang.

### **Sejarah, Dinamika Konflik dan Penyelesaian Sengketa**

Senkaku merupakan kepulauan yang terletak 170 km dari Taiwan, 330 km dari Cina, 170 km dari Ishigaki (Jepang) dan 410 km dari Okinawa (Jepang) di Laut Cina Timur.<sup>15</sup> Kepulauan tersebut merupakan delapan pulau dengan total luas wilayah sebesar 6,3 km<sup>2</sup> yang terdiri atas Tiga pulau dari kepulauan tersebut adalah batuan tandus dan lima lainnya merupakan pulau kecil. Kedelapan pulau tersebut adalah Uotsurijima, Kitakojima, Minamikojima, Kuba, Taisho, Okinokitaiwa, Okinominamiwa, dan Tobise.<sup>16</sup>

Dalam klaimnya kedua negara memiliki sejarah kepemilikan yang jauh berbeda. Berdasarkan klaim historisnya Cina menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku telah masuk di dalam wilayah teritori Cina sejak dulu. Kepulauan ini pertama kali ditemukan oleh Cina pada masa pemerintahan Dinasti Ming (1368-1644) dan dinamakan dengan nama Diaoyu Dao.<sup>17</sup> Kemudian pada masa pemerintahan Dinasti Qing (1644-1911) Cina memasukkan kepulauan tersebut kedalam yurisdiksi Taiwan.<sup>18</sup> Kepulauan Senkaku ini tetap menjadi milik Cina hingga terjadinya perang antara Cina dan Jepang (1894-1895). Pada perang tersebut Cina harus mengalami kekalahan dan menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Jepang. Penyerahan wilayah kekuasaan Cina kepada Jepang ini tercantum dalam perjanjian Shimonoseki.<sup>19</sup> Perjanjian tersebut berisi tentang batasan-batasan wilayah Cina yang akan diberikan kepada Jepang. Pada artikel kedua dinyatakan bahwa wilayah Cina yang harus diberikan kepada Jepang atas kekalahannya dalam peperangan adalah Taiwan beserta dengan kepulauan-kepulauan yang masuk dalam wilayah teritorinya. Dengan adanya perjanjian

---

<sup>15</sup> Japan Ministry of Foreign Affairs, *The Senkaku Islands* (2013), hlm. 2

<sup>16</sup> Zhongqi Pan, *Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands : The Pending Controversy from the Chinese Perspective*, Journal of Chinese Political Science, vol. 12, no. 1 (2007), hlm. 71

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mark E Manyin, *Senkaku (Diaoyu/Diayoutai Islands Dispute : U.S. Treaty Obligations* (Congressional Research Service, 2012), hlm. 2

<sup>19</sup> Steven Wei Su, *The Territorial Dispute over Tiaoyu/ Senkaku Islands: An Update* (Beijing : Taylor and Francis Group, 2005), hlm. 48

tersebut Kepulauan Senkaku yang sebelumnya telah masuk dibawah yurisdiksi Taiwan juga terikat dalam perjanjian dan harus diserahkan kepada Jepang. Kepulauan Senkaku tetap berada dibawah kendali Jepang hingga berakhirnya Perang Dunia II. Berakhirnya Perang Dunia II terdapat perjanjian San Francisco yang mengikat Jepang untuk mengembalikan semua wilayah jajahannya kepada pemiliknya yang sah.<sup>20</sup> Pada artikel kedua, Taiwan merupakan salah satu wilayah yang akan dikembalikan. Berdasarkan perjanjian-perjanjian perdamaian tersebut Cina beranggapan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan miliknya yang seharusnya dikembalikan oleh Jepang.

Bertolak belakang dengan Cina, Jepang berdasarkan klaim historisnya Jepang dalam hal ini juga mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku merupakan miliknya. Jepang telah menemukan Kepulauan Senkaku terlebih dulu pada tahun 1885.<sup>21</sup> Kepulauan tersebut tidak berpenghuni dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kepemilikan dari Cina atas kepemilikannya. Oleh karena itu Jepang kemudian menduduki kepulauan tersebut dan memilikinya sesuai dengan hukum *terra nullius*.<sup>22</sup> Hukum *terra nullius* ini menyatakan apabila terdapat sebuah wilayah tanpa kepemilikan maka hal ini terbuka untuk diambil.<sup>23</sup> Maka dalam kasus ini negara yang terlebih dahulu menduduki wilayah tersebut dapat dikatakan menjadi pemiliknya. Setelah menemukannya, sepuluh tahun kemudian Jepang sebagai negara yang menemukannya memasukkan Kepulauan Senkaku ke dalam prefektur Okinawa. Masuknya Kepulauan Senkaku kedalam prefektur Okinawa ini disahkan oleh kabinet.<sup>24</sup> Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang saat itu, Kepulauan Senkaku resmi menjadi milik Jepang.

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, sesuai dengan perjanjian San Francisco, Jepang akan mengembalikan wilayah-wilayah jajahannya.<sup>25</sup> Pada artikel kedua memang disebutkan bahwa Jepang akan mengembalikan wilayah Taiwan kepada Cina. Namun Kepulauan Senkaku tidak tercantum di dalam perjanjiannya sehingga dalam hal ini Jepang merasa tidak harus mengembalikan Kepulauan Senkaku kepada Cina. Oleh karena itu menurutnya Kepulauan Senkaku bukanlah bagian dari Taiwan yang harus dikembalikan, melainkan kepulauan yang telah menjadi bagian dari wilayah Jepang sebelum peperangan antara Cina dan Jepang terjadi. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Cina

---

<sup>20</sup> Taiwan Document Project, San Francisco Peace Treaty dalam <http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm>, diakses 17 Juni 2013

<sup>21</sup> Reinhard Drifte, *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Rebecca M. M. Wallace, *Hukum Internasional* (London : Sweet & Maxwell, 1986), hlm. 95

<sup>24</sup> Japan Ministry of Foreign Affairs, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>25</sup> Steven Wei Su, *Op.Cit.*, hlm. 49



dan Jepang memiliki perbedaan klaim yang cukup mendasar pada sejarah kepemilikannya.

Perbedaan klaim dan persepsi dari masing-masing negara baru dinyatakan secara verbal pada tahun 1971. Jika dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang digunakan penulis maka hal ini menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi antara Cina dan Jepang telah memasuki tahap *difference*.<sup>26</sup> Akan tetapi dalam perkembangannya Cina mulai mengambil tindakan di awal tahun 1990-an. Cina mulai menekankan batas-batas maritimnya dengan menggunakan *Law of the People's Republic of China on its Territorial Waters and their Contiguous Areas* dan memasukkan Kepulauan Senkaku di dalamnya. Menanggapi tindakan yang diambil oleh Cina, Jepang mengoreksi kembali kesepakatannya dengan Deng Xiaoping untuk mengesampingkan isu mengenai Kepulauan Senkaku. Tindakan Cina dan Jepang tersebut menunjukkan bahwa perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua negara semakin menguat dan telah memasuki tahap *contradiction*.<sup>27</sup>

Pada tahun 1996 Jepang membangun mercusuar pada pulau Uotsurijima, Kepulauan Senkaku. Isu tentang pembangunan mercusuar tersebut membuat hubungan bilateral kedua negara memanas. Hal ini membuat para aktivis dari Taiwan dan Hongkong berlayar menuju kepulauan. Meski mendapat penjagaan ketat dari Jepang, para aktivis tetap berupaya mendekati pulau. Untuk menghindari para penjaga pantai Jepang mereka memilih mendekati pulau dengan cara berenang. Hingga satu dari para aktivis yang bernama David Chan dinyatakan tewas karena tenggelam.<sup>28</sup> Peristiwa tersebut membuat hubungan Cina dan Jepang semakin memburuk. Namun pada peristiwa tersebut kedua negara masih berinisiatif untuk meredam eskalasi konflik. Cina meredam aksi protes di tingkat domestik, dan Jepang menunda pengakuan atas mercusuar yang dibangunnya. Sejak adanya serangkaian peristiwa terjadi pada tahun tersebut Cina dan Jepang dapat dikatakan memasuki tahap *polarization* atau polarisasi.<sup>29</sup>

Sejak sengketa Kepulauan Senkaku ini kembali memanas di tahun 1996 sesungguhnya antara Cina dan Jepang telah dilakukan upaya untuk menyelesaikannya. Awal dari upaya penyelesaian sengketa ini mula-mula diajukan oleh Jepang pada tahun 1997 ketika Cina dan Jepang

---

<sup>26</sup> Tahap *difference* merupakan tahapan awal pada dinamika konflik ketika diantara para aktor mulai muncul perbedaan persepsi

<sup>27</sup> Tahap *contradiction* adalah tahap kedua pada dinamika konflik disaat perbedaan antara para aktor semakin menguat

<sup>28</sup> South China Morning Post, *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> Tahap polarisasi ini merupakan saat ketika suatu negara mulai melihat pihak lawan sebagai musuh

pertama kali bertemu dalam membahas membahas perjanjian perikanan antara Cina dan Jepang di Laut Cina Timur sejak hubungan kedua negara kembali memanas.<sup>30</sup> Dalam pertemuan tersebut Cina, Jepang, dan Korea Selatan membicarakan terkait pembagian zona atau wilayah untuk memancing dari masing-masing negara. Saat itulah Jepang mulai mengajukan untuk menyelesaikan sengketa berdasar pada garis meridian antara kedua negara. Namun penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Jepang tidak bisa diterima oleh Cina. Karena dalam pertemuan tersebut yang akan dibahas adalah mengenai perjanjian perikanan tanpa memandang permasalahan hukum lainnya. Sehingga dalam hal ini upaya penyelesaian sengketa belum bisa terlaksana.

Selanjutnya Cina dan Jepang kembali bertemu untuk membahas permasalahan antara kedua negara di perbatasan dalam konsultasi atas hukum laut dan delimitasi ZEE tahun 1998. Dalam pertemuan tersebut kedua negara berupaya menyelesaikan sengketa melalui delimitasi ZEE. Akan tetapi kedua negara masih bersikeras pada posisinya masing-masing. Cina bersikeras bahwa ia menggunakan asas *natural prolongation* dalam menentukan batas kedaulatan terluar negaranya. Namun berbeda dengan Cina, Jepang memilih untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian sesuai dengan garis *equidistance*. Karena perbedaan pendapat inilah maka upaya penyelesaian sengketa melalui delimitasi ZEE tidak bisa lagi dilanjutkan.

Belum tercapainya kesepakatan dalam upaya penyelesaian sengketa melalui delimitasi ZEE antara Cina dan Jepang membuat kedua negara kembali bertemu pada tahun 2004. Pertemuan tersebut berlangsung selama empat tahun hingga pada tahun 2008 menghasilkan kesepakatan : 1. *Joint development* yang tidak lain adalah tahap awal dari normalisasi hubungan kedua negara yang akan dilakukan di utara Laut Cina Timur, 2. Yakni partisipasi dari Jepang untuk turut serta dalam pengembangan ladang gas dan minyak Chunxiao berdasar pada hukum Cina.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa antara kedua negara mulai terlihat. Karena dengan adanya *joint development* ini kedua negara selanjutnya juga dapat memulai untuk melakukan delimitasi ZEE secara bertahap sehingga penyelesaian sengketa antara kedua negara dapat segera terwujud. Namun upaya penyelesaian sengketa ini harus terhenti karena Cina cenderung bersikap pasif dalam *joint development* yang telah disepakati bersama. Hal ini terus berlanjut hingga ketegangan kembali meningkat di tahun 2010 hingga tahun 2013.

---

<sup>30</sup> Sourabh Gupta, *Loc. Cit.*, hlm. 2

<sup>31</sup> Reinhard Drifte, *North East Asia: Territorial Disputes and Divided Countries*, (Daiwa Foundation Japan House, 2009), hlm. 2

## Peningkatan Kekuatan Ekonomi dan Militer Cina

Antara Cina dan Jepang sesungguhnya telah dilakukan upaya untuk penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku. Namun upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan hingga tahun 2013 belum menemukan penyelesaian. Hal ini tidak lepas dari fenomena yang saat itu juga sedang terjadi, yakni adanya peningkatan kekuatan Cina.<sup>32</sup> Peningkatan kekuatan Cina yang kemudian membuatnya bersikeras untuk menekankan klaimnya secara tidak langsung telah membuat Jepang menjadi lebih protektif dari sebelumnya.<sup>33</sup> Sehingga upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku juga semakin terhambat.

Peningkatan ekonomi Cina dimulai sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping di tahun 1978.<sup>34</sup> Sejak masa pemerintahannya, Deng menerapkan sejumlah perubahan untuk kebijakan perekonomian Cina. Hal ini berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat pesat jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina dapat ditunjukkan pada angka rata-rata pertumbuhan GDPnya dan total nilai perdagangannya.

Apabila melihat pada angka rata-rata pertumbuhan GDP Cina dan Jepang, angka rata-rata yang diperoleh Cina sejak tahun 1979 hingga tahun 2010 mencapai 9,91%.<sup>35</sup> Angka ini sangat tinggi jauh melebihi negara tetangganya yakni Jepang yang hanya mampu memperoleh angka rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 0,52% terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2013.<sup>36</sup> Meski GDP Jepang di tahun 1996 jauh berada di atas Cina, apabila dilihat berdasar pada angka pertumbuhan rata-rata GDP, dalam perkembangannya pertumbuhan GDP Jepang justru lebih rendah jika dibandingkan dengan Cina. Angka rata-rata pertumbuhan GDP Cina ini juga berada di atas Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Angka rata-rata pertumbuhan GDP Amerika Serikat sejak tahun 1990 hingga tahun 2008 adalah sebesar 5,8% dan pasca terjadinya krisis finansial global angka tersebut hanya mampu bertahan di angka 3,6%.<sup>37</sup> Berdasarkan hal tersebut, bukanlah

---

<sup>32</sup> Peningkatan kekuatan negara dapat mempengaruhi sikap suatu negara untuk bersikap lebih agresif. Hal ini didukung oleh pernyataan Kenneth Waltz bahwa terdapat negara-negara yang akan berupaya untuk memperluas kekuasaan yang dimilikinya ketika kondisinya cukup memungkinkan. Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>33</sup> Kenji Minemura et al, *China to keep ships fishing boats near Senkaku*, dalam <http://ajw.asahi.com/article/asia/china/AJ201209200070>, diakses 20 November 2013

<sup>34</sup> Arthur Waldron, *Review of International Studies : The Rise of China : military and political implication* (2005), hlm. 717

<sup>35</sup> Wayne M. Morrison, *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States* (Congressional Research Service, 2013), hlm. 3

<sup>36</sup> Trading Economics, *Japan GDP Growth Rate*, dalam <http://www.tradingeconomics.com/japan/gdp-growth>, diakses 24 Juli 2013

<sup>37</sup> Trading Economics, *United State Annual GDP Growth Rate*, dalam <http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth-annual>, diakses 24 Juli 2013

hal yang mustahil bagi Cina untuk dapat menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin perekonomian beberapa tahun mendatang.

Selain pada GDP dan angka rata-rata pertumbuhannya, peningkatan kekuatan ekonomi Cina juga dapat dilihat pada total nilai perdagangannya. Pada tahun 1978 total nilai perdagangan Cina hanya mencapai 20,6 juta US\$. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Cina hanya mampu menduduki peringkat ke-32 dari total nilai perdagangan dunia.<sup>38</sup> Namun sejak Deng Xiaoping memberlakukan *open door policy* atau kebijakan pintu terbuka, total nilai perdagangan Cina mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti hingga pada tahun 2010 total nilai perdagangan Cina mencapai 2.974 juta US\$ yang terdiri atas 1.577 juta US\$ pada total nilai eksportnya dan 1.396 juta US\$ pada total nilai impornya yang membuatnya menduduki peringkat pertama sebagai eksportir terbesar dan peringkat kedua sebagai importer terbesar di dunia.<sup>39</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa hingga pada tahun 2010 total nilai perdagangan Cina telah meningkat sebanyak 144 kali lebih besar dari sejak pertama kali kebijakan pintu terbuka diimplementasikan.

Data-data diatas dapat menunjukkan bahwa Cina sedang mengalami peningkatan kekuatan apabila ditinjau dari segi perekonomiannya. Cina yang sebelumnya jauh berada di bawah negara-negara maju di kawasan Asia seperti Jepang, kini justru mampu menyamakan kedudukan bahkan hingga melebihinya. Cina juga berpotensi menjadi pemimpin bagi perekonomian dunia di masa yang akan datang.

Cina tidak hanya mengalami peningkatan di bidang perekonomian saja, tetapi juga di bidang militer. Peningkatan kekuatan militer Cina ini dimulai setelah terjadinya peristiwa Tianamen pada tahun 1989 sebagai bentuk penghargaan kepada para tentara yang telah mampu menyelamatkan rezim pemerintahan.<sup>40</sup> Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Cina memiliki modalitas untuk memperkuat *China's People Liberation Army* (PLA). Cina mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk memperkuat kekuatan militernya. Sebab kekuatan militer Cina akan menyesuaikan dengan peningkatan ekonominya. Hal ini sesuai dengan buku putih pertahanan Cina yang menyatakan bahwa Cina akan berupaya untuk mengkoordinasikan antara pengembangan

---

<sup>38</sup> China White Paper, *Historic Progress in China's Foreign Trade*, dalam [http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-12/07/content\\_24093589.htm](http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-12/07/content_24093589.htm) diakses 27 November 2013

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Arthur Waldron, *Op.Cit.*, hlm. 721

ekonomi dan pertahanan nasional.<sup>41</sup> Oleh karena itu pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan militernya. Meski anggaran militer Cina dikoordinasikan dengan peningkatan ekonominya, untuk anggaran militer ini Cina hanya menganggarkan tidak lebih dari 10% GDP-nya yang juga mengalami penurunan sejak awal tahun 2000. Namun anggaran militer Cina sejak tahun 1989 hingga selalu konstan mengalami peningkatan lebih dari 10% setiap tahunnya.<sup>42</sup> Beberapa peneliti memperkirakan pengeluaran untuk militer Cina jauh lebih besar daripada itu. Salah satunya dari *Center For Strategic and International Studies* yang memprediksi anggaran militer Cina hingga tahun 2012 mencapai US\$ 106,4 milyar.<sup>43</sup>

Dengan anggaran yang besar Cina berupaya untuk memperkuat kekuatan militernya dengan melakukan modernisasi pada empat bidang yakni, kekuatan darat, laut, udara dan rudalnya. Untuk masing-masing bidang, Cina melakukan perubahan baik secara struktur, sumber daya manusia maupun persenjataan.<sup>44</sup> Cina disini berupaya untuk mengubah formasi militernya untuk lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas sehingga pada masing-masing bidang, pasukan akan diklasifikasikan kedalam kelompok-kelompok yang lebih kecil agar lebih terspesialisasi dan handal pada misi-misi tertentu. Selain merubah strukturnya Cina juga akan mengurangi pasukan militernya. Meski Cina mengurangi pasukan militernya, sebagai gantinya Cina akan terus memodernisasi persenjataan yang dimilikinya dengan teknologi-teknologi baru. Beberapa contoh modernisasi yang dilakukan Cina pada kekuatan militernya yakni modernisasi armada-armada di darat untuk lebih kuat, cepat, *amphibious*<sup>45</sup>, dan lebih mudah untuk dioperasikan. Kemudian pada kapal-kapal perang yang sebelumnya hanya mampu bergerak di pesisir dan di lingkup regional saja kini dimodernisasi agar mampu bergerak ke laut lepas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Cina Hu Jintao pada tahun 2006 bahwa Cina akan memperkuat kekuatan maritimnya dengan tujuan untuk dapat beradaptasi dengan misi-misi historis di abad dan periode yang baru.<sup>46</sup> Sedangkan pada pesawat tempur yang sebelumnya hanya dipersiapkan

---

<sup>41</sup> China White Paper, *National Defense policy*, dalam [http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content\\_17162883.htm](http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content_17162883.htm), diakses 23 Desember 2013

<sup>42</sup> Claire Taylor and Kim Youngs, *House of Commons : China's Military Posture* (London : House of common library, 2008), hlm. 19

<sup>43</sup> Anthony H. Cordesman and Nicholas S. Yarosh, *Center for Strategic and International Studies : Chinese Military Modernization and Force Development* (Center for Strategic and International Studies, 2012), hlm. 64

<sup>44</sup> Claire Taylor, *Op.Cit.*

<sup>45</sup> *Amphibious* maksudnya armada-armada tidak hanya mampu beroperasi di daratan tetapi juga di perairan

<sup>46</sup> Andrew S. Erickson dan Michael S. Chase, *Information and Technology and China's Naval Modernization*, JFQ, issue 50, 3<sup>rd</sup> quarter, 2008

sebagai alat untuk bertahan saja kini juga dipersiapkan jika akan digunakan untuk menyerang.

### **Perubahan Sikap dan Kepentingan Cina**

Sejak terjadinya peningkatan kekuatan Cina, terdapat perubahan sikap dan kepentingannya yang semakin menghambat upaya penyelesaian sengketa. Perubahan tersebut dapat dilihat pada bidang ekonomi dan keamanan. Di bidang ekonomi, Cina sebagai mitra dagang utama Jepang sebelumnya masih banyak mengekspor bahan-bahan baku kepada Jepang. Namun sejak Cina terlibat sengketa Kepulauan Senkaku dengan Jepang, Cina mampu menunjukkan bahwa ia tidak lagi banyak bergantung kepada Jepang. Cina berani untuk menghentikan ekspor mineral langkanya kepada Jepang. Ini menunjukkan bahwa Cina dengan perekonomiannya saat ini mulai berani untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih agresif, dimana Cina tidak lagi banyak bergantung pada Jepang seperti sebelumnya.

Selain itu hal ini juga berpengaruh pada bidang teknologi. Dengan peningkatan kekuatan ekonominya, Cina mampu mengembangkan teknologi untuk melakukan pengeboran minyak secara mandiri tanpa membutuhkan bantuan modal dan teknologi dari pihak asing sehingga pada kasus sengketa Kepulauan Senkaku ini Jepang yang sebelumnya memiliki peluang untuk memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Cina melalui transfer teknologi dan melakukan *joint development* akan semakin sulit tercapai. Cina dalam hal pengeboran minyak di wilayah perairan Kepulauan Senkaku sebenarnya juga bisa menolak *joint development* yang diajukan oleh Jepang. Hal ini dikarenakan Cina lebih menguasai medan di wilayah tersebut. Cina telah lebih dulu mengeksplorasi Laut Cina Timur apabila dibandingkan dengan Jepang yang baru melakukan eksplorasi di tahun 2004.<sup>47</sup>

Dengan kekuatan yang ekonomi dan militernya saat ini, Cina juga beberapa kali mencoba untuk mulai menunjukkan kekuatannya kepada Jepang sebagai pihak oposisi dalam sengketa Kepulauan Senkaku. Sejak pertengahan tahun 1990an, memang banyak terlihat kapal Cina yang mulai berani untuk menggerakkan kapalnya masuk ke dalam wilayah perairan yang telah di klaim oleh Jepang dalam EEZnya.<sup>48</sup> Namun tidak terbatas pada kapal riset saja tetapi juga kapal-kapal patroli Cina. Berdasarkan data yang diperoleh dari *CNA Maritime Asia Project* sejak tahun 2011 banyak kapal-kapal dari *China Maritime Law Enforcement* yang juga mulai masuk ke wilayah perairan Kepulauan Senkaku.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Reinhard Drifte, *Op.Cit.*, hlm. 24

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa bangkitnya kekuatan militer Cina membuatnya menjadi semakin agresif dalam memperebutkan kontrol efektif atas Kepulauan Senkaku. Bahkan sejak pertengahan 1990an kasus pelanggaran yang dilakukan Cina dengan memasuki kawasan EEZ Jepang meningkat dari 2 kasus menjadi 21 kasus di tahun 2000an. Dengan semakin kompleksnya permasalahan antara kedua negara, maka upaya untuk penyelesaian sengketa antara kedua negara juga akan semakin terhambat.

Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Cina ini tidak lepas dari adanya kepentingan yang ingin dicapainya. Kepentingan yang ingin dicapai ada dua yakni pada bidang ekonomi dan keamanan. Pada bidang ekonomi, Cina dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat akan semakin banyak membutuhkan sumber energi. Pada buku putih pertahanan Cina dinyatakan bahwa sumber energi yang dibutuhkan Cina sejak tahun 1980 hingga tahun 2006 telah mengalami peningkatan sebesar 5,6% setiap tahunnya untuk mendorong pertumbuhan GDP sebesar 9,6%.<sup>49</sup> Sumber energi yang paling banyak dibutuhkan Cina adalah batu bara yakni sebesar 70% dari 90 triliyun *British thermal units* (Btu) total energi yang digunakan.<sup>50</sup>

Cina sebagai negara dengan konsumsi batu bara terbesar di dunia menyadari akan gas emisi dan dampaknya terhadap lingkungan. Sehingga Cina disini berupaya untuk mengurangi ketergantungannya pada batu bara. Tidak hanya batu bara saja, Cina juga berusaha untuk mengurangi konsumsinya terhadap minyak. Maka dari itu Cina berusaha mencari sumber energi alternatif. Salah satu sumber energi pengganti yang digunakan adalah gas alam. Berdasarkan data yang diperoleh dari *United States Energy Information Administration* (EIA), Cina akan mereduksi konsumsi batu baranya dari 72% menjadi 65% pada tahun 1996-2020.<sup>51</sup> Akan tetapi sumber minyak lepas pantai yang diharapkan mampu memproduksi minyak lebih besar daripada di daratan ternyata hanya mampu menghasilkan 10% dari minyak yang dihasilkan dari sumber minyak di daratan.<sup>52</sup> Oleh karena itu cadangan energi alternatif yang selanjutnya akan digunakan oleh Cina adalah sumber minyak dan gas yang terdapat di perairan Kepulauan Senkaku dimana wilayah tersebut sedang dalam status sengketa. Agar perekonomiannya tetap terus berjalan Cina akan bersikeras untuk memperjuangkan hak-haknya atas kepemilikan Kepulauan Senkaku.

---

<sup>49</sup> China White Paper, *Current Energy Situation*, dalam <http://www.china.org.cn/english/whitepaper/energy/237115.htm>, diakses 23 Desember 2013

<sup>50</sup> U.S. Energy Information Administration, China, 2013, hlm. 2

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Erica Strecker Downs, *China Quest For Energy Security* (2000), hlm. 7

Sedangkan untuk bidang keamanan, pada dasarnya Cina disini berupaya untuk memperbaiki kedaulatan, kesatuan, dan integritas perbatasannya. Akan tetapi dalam perkembangannya Cina lebih terfokus untuk mengamankan wilayah-wilayah yang terdapat di perbatasan. Tujuan utama Cina adalah untuk mengedepankan keamanannya di lautan. Laut merupakan kepentingan fundamental bagi Cina.<sup>53</sup> Sebab melalui laut Cina dapat memperoleh cadangan energi dan memanfaatkannya sebagai jalur *Sea Lines of Communication* (SLOC) yang tidak lain juga dapat menunjang perekonomian Cina.<sup>54</sup> Jendral dari *China's People Liberation Army Navy* (PLAN) kemudian menyatakan bahwa ancaman utama Cina berasal dari laut. Sebab laut merupakan salah satu *core interest* atau kepentingan utamanya.<sup>55</sup>

Apabila dikaitkan dengan sengketa Kepulauan Senkaku, sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Cina pada 26 April 2013 bahwa Kepulauan Senkaku dalam hal ini dianggap sebagai isu kedaulatan perbatasan maka hal tersebut juga termasuk di dalam kepentingan utama Cina. Konsekuensi dengan adanya pernyataan tersebut Cina dapat mengambil tindakan-tindakan seperti : pendekatan yang lebih fleksibel pada masalah-masalah persengketaan, mencegah adanya anggapan bahwa Cina tidak mengambil tindakan, mencegah adanya anggapan bahwa Cina mengambil tindakan secara sepihak dan menimbulkan ketegangan hubungan antar negara.<sup>56</sup> Sehingga dalam hal ini Cina dapat bergerak lebih fleksibel untuk menanggapi masalah persengketaan wilayah di wilayah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan yang salah satunya adalah wilayah Kepulauan Senkaku.

## **Kesimpulan**

Sengketa terkait kepemilikan Kepulauan Senkaku ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan penyelesaiannya. Sengketa Kepulauan Senkaku ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1969 ketika ECAFE menemukan adanya cadangan gas dan minyak yang cukup besar diwilayah perairan Kepulauan Senkaku. Hingga Cina mulai menekankan klaimnya di tahun 1971. Namun hal ini dibantah oleh Jepang, karena juga merasa memiliki dasar klaim yang kuat. Hingga akhirnya pada tahun 1978 perwakilan dari Cina dan Jepang sepakat untuk mengesampingkan permasalahan ini karena akan lebih baik diselesaikan oleh generasi selanjutnya. Akan tetapi pada tahun 1996, permasalahan antara kedua negara kembali terjadi ketika

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Akiyama Masahiro, *Geopolitical Considerations of the Senkaku Islands* (n.d), hlm. 6

<sup>55</sup> International Crisis Group, *Dangerous Waters: China-Japan Relations on the Rocks* (Brussels : International Crisis Group, 2013), hlm. 16

<sup>56</sup> Caitlin Campbell et al, *China's Core Interests and the East China Sea* (2013), hlm. 5



Jepang membangun mercusuar pada salah satu pulau di Kepulauan Senkaku. Sejak saat itu kapal-kapal patroli dan para aktivis dari Cina terus berupaya memasuki kawasan wilayah perairan Kepulauan Senkaku.

Para petinggi negara menyadari pentingnya hubungan bilateral antara Cina dan Jepang, sehingga keduanya juga berupaya untuk melakukan negosiasi dan mengajukan solusi atas permasalahan tersebut. Sejak tahun 1998 kedua negara mulai membicarakan delimitasi ZEE. Akan tetapi karena sikap masing-masing negara yang bersikeras pada posisinya maka negosiasi tidak berjalan lancar. Pada tahun 2004 kedua negara kembali bertemu untuk menyelesaikan sengketa antara kedua negara melalui *joint development*. Akhirnya kedua negara sepakat untuk melakukan *joint development* dengan melakukan delimitasi ZEE secara bertahap yang rencananya akan dimulai pada tahun 2008. Akan tetapi kerjasama kedua negara tidak berlanjut karena lemahnya komitmen kedua negara atas kesepakatan yang telah dibuat. Pada tahun 2010 hubungan bilateral antara Cina dan Jepang kembali memanas karena adanya insiden penabrakan kapal nelayan Cina kepada kapal penjaga Jepang. Kemudian pada tahun 2012 hubungan keduanya semakin memanas saat Jepang kemudian memutuskan untuk membeli tiga pulau dari delapan pulau Kepulauan Senkaku hingga pada akhirnya Cina mengemukakan bahwa Senkaku adalah *core interest*-nya di tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap penyebab belum tercapainya penyelesaian sengketa antara Cina dan Jepang meski telah dilakukan upaya penyelesaian selama 1998-2013.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menemukan bahwa Cina dan Jepang memiliki dasar klaim historis yang berbeda. Cina mengklaim, bahwa Kepulauan Senkaku diberikan kepada Jepang karena kekalahannya pada perang tahun 1895. Namun pasca berakhirnya Perang Dunia II, sesuai dengan perjanjian San Francisco Jepang harus mengembalikan Kepulauan Senkaku kepada Cina. Sedangkan, Jepang mengklaim kepemilikan Kepulauan Senkaku berdasar pada hukum *Terra Nullius* yakni kepemilikan atas tanah yang tidak bertuan. Jepang menemukan Kepulauan Senkaku pada tahun 1885 dan memasukkan ke dalam prefektur Okinawa dengan disahkan oleh kabinet pada tahun 1895. Penulis disini menganalisis penyebab belum adanya penyelesaian antara Cina dan Jepang dengan melihat dari sisi Cina. Sebab kontrol efektif Kepulauan Senkaku sebelumnya dipegang oleh Jepang sehingga Cina terlihat sebagai pihak yang berusaha untuk merebutnya.

Penulis melihat bahwa Cina kini telah mengalami peningkatan kekuatan baik dari segi perekonomian maupun kekuatan militernya. Pada bidang ekonomi peningkatan kekuatan ini ditunjukkan dengan tingginya angka pertumbuhan GDP Cina dan total nilai perdagangannya jika

dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan. Sedangkan pada kekuatan militernya Cina berusaha untuk mengkoordinasikan anggaran militernya dengan perekonomian negaranya. Besarnya anggaran militer tersebut digunakan untuk melakukan modernisasi baik pada struktur, formasi maupun persenjataannya. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini Cina terkesan bersikap lebih agresif karena berusaha mengamankan *core interest* atau kepentingan utamanya di wilayah Kepulauan Senkaku yang terdiri atas cadangan energi dan keamanan jalur maritimnya yang tidak lain juga akan digunakan untuk menunjang perekonomiannya. Sehingga upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan selama 1998-2013 belum menemui penyelesaian.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Artikel**

- Campbell, Caitlin et all. *China's Core Interests and the East China Sea*, 2013
- Cordesman, Anthony H. and Yarosh, S. Nicholas. *Center for Strategic and International Studies : Chinese Military Modernization and Force Development*. Center for Strategic and International Studies, 2012
- Drifte, Reinhard. *Japanese-Chinese Territorial Disputes in the East China Sea – Between Military Confrontation and Economic Cooperation*. London : The London School of Economics and Political Science, 2008
- \_\_\_\_\_. *North East Asia: Territorial Disputes and Divided Countries*. Daiwa Foundation Japan House, 2009
- Erickson, Andrew S. dan Chase, Michael S. *Information and Technology and China's Naval Modernization*. JFQ. issue 50. 3<sup>rd</sup> quarter, 2008
- Gupta, Sourabh. *China-Japan trawler incident: Japan's unwise – and borderline illegal – detention of Chinese skipper*. Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific, 2010
- \_\_\_\_\_. *China-Japan trawler incident: Reviewing the dispute over Senkaku/Daioyu waters*. Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific, 2010
- International Crisis Group, *Dangerous Waters: China-Japan Relations on the Rocks*. Brussels : International Crisis Group, 2013
- Japan Ministry of Foreign Affairs. *The Senkaku Islands*, 2013
- \_\_\_\_\_. *Recent Developments in China-Japan Relations : Basic Facts on the Senkaku Islands and recent incidents*, 2010
- Masahiro, Akiyama. *Geopolitical Considerations of the Senkaku Island*, n.d.

- Manyin, Mark E. *Senkaku (Diaoyu/Diaoyutai Islands Dispute : U.S. Treaty Obligations*. Congressional Research Service, 2012
- Morrison, Wayne M. *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Congressional Research Service, 2013
- Pan, Zhongqi. *Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands: The Pending Controversy from the Chinese Perspective*, Journal of Chinese Political Science, vol. 12, no. 1, 2007
- Su, Steven Wei. *The Territorial Dispute over Tiaoyu/ Senkaku Islands: An Update*. Beijing : Taylor and Francis Group, 2005
- Taylor, Claire and Youngs, Kim. *House of Commons : China's Military Posture*. 2008. London : House of common library, 2008
- Waldron, Arthur. *Review of International Studies : The Rise of China : military and political implication*. Review of International Studies, volume 31, issue 4, 2005
- Wallace, Rebecca M. *Hukum Internasional*. London : Sweet & Maxwell, 1986

### Website dan Artikel Internet

- Cheng. *Diaoyu Islands Dispute*. 1997. Dalam <http://www1.american.edu/TED/ice/DIAOYU.HTM>, diakses 8 April 2013
- China White Paper. *Current Energy Situation*. 2010. Dalam <http://www.china.org.cn/english/whitepaper/energy/237115.htm>, diakses 23 Desember 2013
- \_\_\_\_\_. *National Defense policy*. 2008. Dalam [http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content\\_17162883.htm](http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content_17162883.htm), diakses 23 Desember 2013
- Chinese Embassy. 2013. *Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on April 26, 2013*. Dalam <http://ag.chineseembassy.org/eng/fyrth/t1035948.htm>, diakses 11 Desember 2013
- Global Security. *Senkaku Diaoyutai Islands*. 2013. Dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm>, diakses 17 Juli 2013
- Japan Policy Forum. *Japan-China Discord and Cooperation over East China Sea*. 2012. Dalam <http://www.japanpolicyforum.jp/en/archive/no12/000370.html#kiji>, akses 17 september 2013
- Minemura, Kenji et all. *China to keep ships fishing boats near Senkaku*. 2012. Dalam <http://ajw.asahi.com/article/asia/china/AJ201209200070>, diakses 20 November 2013

- \_\_\_\_\_. *Chinese Navy begins training exercise in East China Sea*. 2012. Dalam <http://ajw.asahi.com/article/asia/china/AJ201210190067>, diakses 8 April 2013
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2005. *Japan-China Consultation on the East China Sea and Other Matters*. Dalam <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/consult0509.html>, diakses 23 Oktober 2013
- South China Morning Post. *Timeline: The Diaoyu - Senkaku Islands dispute*. n.d. Dalam <http://www.scmp.com/news/china/article/1039204/timeline-diaoyu-senkaku-islands-dispute>, diakses 1 April 2013
- Trading Economics. *Japan GDP*. 2013. Dalam <http://www.tradingeconomics.com/japan/gdp>, diakses 11 Agustus 2013
- \_\_\_\_\_. *United State Annual GDP Growth Rate*. 2013. Dalam <http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth-annual>, diakses 24 Juli 2013